

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Australia dan Indonesia telah cukup lama menjalin kerja sama di berbagai bidang seperti, politik, keamanan, perdagangan, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan sebagainya. Kondisi ini tidak lepas dari perkembangan arus globalisasi dan letak geografis yang menjadi faktor penentu kedua negara untuk lebih mempererat hubungan bilateral. Hal tersebut membuat Australia menjadikan Indonesia sebagai mitra atau prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negerinya. Meskipun terdapat berbagai perbedaan dan sering kali terdapat tantangan, namun hubungan kedua negara dapat saling menjanjikan berbagai peluang kerja sama yang menguntungkan. Hal ini juga berangkat dari hubungan antar masyarakat dan kelembagaan yang substansial. Data dari Australian Government (2020) menunjukkan bahwa 85,700 orang kelahiran Indonesia telah tinggal di Australia terhitung hingga tahun 2018. Lebih lanjut, Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-12 bagi Australia (Australian Embassy, 2021). Nilai penting dan strategis yang dimiliki oleh Indonesia ini membuat Australia memberikan berbagai dukungan baik keuangan maupun pembangunan.

Komitmen Australia dalam mendukung kemajuan Indonesia telah tertuang melalui berbagai kemitraan yang dijalin antara kedua negara melalui bantuan luar negeri. Mulai dari bantuan Colombo Plan yang didirikan bersama dengan negara-negara persemakmuran pada tahun 1950-an, hingga membentuk lembaga resmi bantuan luar negeri bernama Australian Aid (AusAID) pada tanggal 1 Desember 1973. Dalam praktiknya, lembaga ini bertanggung jawab secara langsung kepada Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia (BAPPENAS, 2011). Program bantuan ini ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional Australia

dalam meningkatkan ekonomi Indonesia baik secara kelembagaan dan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat, serta pemberdayaan ekonomi dan politik bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum marginal. Ini menggambarkan keseriusan Australia terkait program bantuan guna memperdalam keterlibatan dalam menciptakan kawasan yang makmur dan stabil (Australian Government, 2020a).

Dewasa ini, stabilitas dunia internasional sedang dihadapkan dengan krisis pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah melaporkan kasus pertama penyebaran COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan terus mengalami eskalasi hingga saat ini. Data dari John Hopkins University Medicine dalam (CNN Indonesia, 2021) mencatat bahwa kasus konfirmasi paparan COVID-19 di Indonesia menyumbang 1,36 persen angka kematian secara global serta menempatkan urutan ke-17 dengan kasus terbanyak di dunia. Oleh karena itu, kondisi krisis seperti ini justru membutuhkan penanganan kolektif antar negara. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam *International Coordination Group* (ICG) juga berpendapat bahwa membangun kemitraan dan sinergi akan memperkuat stabilitas negara ditengah COVID-19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah berkomitmen untuk saling membantu dalam segala situasi, termasuk dalam memerangi COVID-19. Menanggapi situasi tersebut, Australia kemudian merumuskan kembali bentuk kemitraan pembangunan dengan Indonesia yang berfokus pada penanganan COVID-19 dalam kerangka kerjasama *Indonesia COVID-19 Development Response Plan* (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2020a). Adapun tiga pilar utama yang dikerahkan oleh Australia dalam bantuan luar negerinya meliputi: (1) Keamanan Kesehatan; (2) Stabilitas Pemerintahan; dan (3) Pemulihan Ekonomi.

Melihat Indonesia dalam kondisi krisis, Australia sebagai mitra utama untuk Indonesia berinisiatif untuk memberikan insentif terhadap bisnis lokal, menciptakan ekonomi inklusif, membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas, serta pemberdayaan ekonomi yang secara khusus ditujukan untuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal (DFAT, 2020a). Bantuan ini adalah bentuk kepedulian Australia dalam rangka mempercepat penanganan penyakit akibat persebaran COVID-19 di Indonesia. Dikutip dari laman (Australian Embassy Indonesia, 2021), Duta Besar Australia, Gary Quinlan menjelaskan sebagai berikut.

“Australia dan Indonesia merupakan mitra dan teman dekat, sama seperti Indonesia membantu kebakaran hutan tahun lalu, kami senang dapat mendukung Indonesia dan menghadapi tantangan COVID-19 bersama-sama”.

Dalam artikel ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 tahun 2020-2021. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah penelitian milik (Davis, 2006; Eldridge, 1971; Rifaldy, 2020) yang menjelaskan bantuan luar negeri Australia menggunakan pendekatan kepentingan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan luar negeri yang diberikan Australia merupakan aset untuk mendapatkan eksistensi di negara penerima bantuan dan tentunya berbagai kepentingan nasional yang dibawa. Selebihnya, artikel ini diharapkan akan memberikan pembaruan dan pembuktian empiris mengenai motivasi dibalik pemberian bantuan luar negeri oleh Australia kepada Indonesia dimasa krisis COVID-19.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian tulisan ini yaitu **apa yang menjadi motivasi Australia memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 terhitung sejak Oktober 2020 hingga Januari 2021?**

1.3. Kerangka pemikiran

Untuk menjelaskan latar belakang diatas dan motivasi Australia memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 tahun 2020-2021 maka digunakanlah konsep kepentingan nasional. Lebih lanjut, dalam studi ilmu hubungan internasional menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional (*national interest*) dapat menjelaskan dasar perilaku politik luar negeri suatu negara dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara di dunia. Ini dibuktikan melalui perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yang selalu linier dengan kepentingan nasionalnya dan akan terus berupaya untuk mempertahankan dan mengamankan hal tersebut. Selain berfungsi untuk mendeskripsikan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional, Mohtar Mas'ood (1990) beranggapan bahwa kepentingan nasional juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan politik luar negeri suatu negara.

Kemudian konsep kepentingan nasional ini juga dikemukakan oleh salah satu tokoh realis, Morgenthau & Thompson (1948) dalam bukunya *Politics Among Nations*. Ia mengungkapkan bahwa kepentingan nasional merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis (Mas'ood, 1990). Pemikiran Morgenthau ini selanjutnya berdasar pada kepentingan nasional yang menjadi dasar dalam diplomasi, bukan berdasar pada moral, legal dan ideologi. Ini kemudian akan mendorong suatu negara untuk terus mengejar kekuasaan atau pengendalian atas negara lain dan untuk mencapai tujuan

tersebut maka dapat melalui teknik-teknik pemaksaan atau kerja sama antar negara.

Mengutip Hans J. Morgenthau, Thomas W. Robinson dalam James N. Rosenau (1962) secara umum mengklasifikasikan kepentingan nasional kedalam enam variabel yaitu, (1) *Primary Interest*, yakni kepentingan nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan atas wilayah dan pertahanan negara, kebudayaan, identitas politik serta keberlangsungan hidup terhadap gangguan luar. (2) *Secondary Interest*, merupakan kepentingan primer seperti melindungi warga negara yang berada diluar negeri. (3) *Permanent Interest*, yaitu kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan periode atau jangka waktu tertentu. (4) *Variable Interest*, adalah kepentingan nasional yang berubah-ubah sesuai dengan opini publik dan situasi politik dalam negeri. (5) *General Interest*, yakni kepentingan nasional yang bersifat umum dan dapat berdasar pada letak geografis, jumlah populasi, aspek ekonomi, perdagangan, investasi, dan sebagainya. (6) *Specific Interest*, berarti kepentingan nasional berdasar pada fokus daerah, isu atau saat tertentu.

Berdasarkan keenam variabel kepentingan nasional diatas, maka konsistensi Australia dalam memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia di masa COVID-19 mengacu pada variabel *Primary Interest* dan *General Interest*. Dalam hal ini, *Primary Interest* dimaksudkan bahwa ancaman atau permasalahan yang ditimbulkan akibat penyebaran COVID-19 merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Australia dalam rangka melindungi warga negaranya. Sementara, *General Interest* dipahami sebagai kepentingan aspek ekonomi yang didukung dengan letak dan posisi geografis Indonesia yang strategis bagi Australia. Kemudian hal ini juga telah dituangkan dalam *Australian White Paper 2017* bahwa kepentingan utamanya adalah meningkatkan kerja sama untuk mendapatkan perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga dilakukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya baik dalam sektor ekonomi, pertahanan, dan kedaulatan.

1.4. Hipotesa

Berdasarkan konsep kepentingan nasional, maka dapat dijelaskan bahwa ada dua motivasi Australia dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 tahun 2020-2021, yaitu:

1. Kepentingan nasional dalam sektor kesehatan yang didapat melalui kolaborasi ilmiah untuk mengembangkan riset vaksin.
2. Kepentingan nasional dalam sektor swasta untuk mengembangkan perekonomian melalui kerja sama antar sektor swasta milik Australia dengan negara penerima donor.

1.5. Metode penelitian

1.5.1 Metode penelitian data

Penulis dalam menjelaskan dan mencari data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilaksanakan pada setting tertentu yang terjadi dalam kehidupan nyata dengan fokus untuk menyelidiki dan memahami sebuah fenomena, seperti apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi (Chariri, 2009). Melalui metode tersebut, data yang dihasilkan adalah data valid yang termuat dalam media cetak buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan *electronic resources* yang semuanya mendukung proses penelitian.

1.5.2 Metode analisis data

Penulis dalam menganalisis data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan teknis analisa korelasionis, dikarenakan tingkat unit eksplanasi dan unit analisisnya sama. Kemudian data akan dikumpulkan

dan dikelompokkan sehingga membentuk proses generalisasi sebagai hasil akhir.

1.6. Batasan penelitian

Penulis dalam merangkai karya tulis ini memberikan jangkauan penelitian yang terhitung sejak Australia membuat kerangka kerjasama dalam bentuk bantuan luar negeri kepada Indonesia untuk menangani penyebaran COVID-19 atau disebut dengan *Indonesia COVID-19 Development Response Plan* yang dirumuskan pada Oktober tahun 2020 hingga kerangka kerjasama tersebut telah memberikan dampak positif bagi penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia terhitung Januari tahun 2021.

1.7. Tujuan penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan guna:

1. Menganalisa motivasi dibalik pemberian bantuan luar negeri oleh Australia kepada Indonesia dimasa COVID-19 tahun 2020-2021.
2. Mengetahui manfaat dari bantuan luar negeri yang diberikan Australia kepada Indonesia untuk menangani penyebaran COVID-19 tahun 2020-2021.

1.8. Sistematika kepenulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

BAB II menjelaskan pembahasan dan analisis yang kemudian terbagi dalam dua sub-pembahasan: (1) Kerjasama Australia dan Indonesia dari waktu ke waktu; dan (2) Hubungan Australia dan Indonesia di masa COVID-19.

BAB III menjelaskan pembahasan dan analisis lebih lanjut mengenai motivasi Australia dibalik pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia.

BAB IV merupakan saran dari penulis dan simpulan dari karya tulis ini.